

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pengambilan keputusan adalah proses yang mempertimbangkan keterbatasan manusia dan lingkungan, serta berfokus pada pencapaian hasil yang memadai daripada mencari solusi yang sempurna. Menurut Simon yang dikutip oleh Sinebe menjabarkan bahwa individu tidak selalu mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, sumber daya, dan kapasitas kognitif. Oleh karena itu, dalam situasi nyata, pengambil keputusan cenderung mencari solusi yang "cukup memadai" atau *satisficing*, bukan solusi yang optimal.<sup>1</sup>

Manusia pada dasarnya adalah makhluk pembuat keputusan. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan pendidikan, pengambilan keputusan merupakan proses penting untuk menentukan tindakan yang tepat. Pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang paling urgen dari kegiatan kepemimpinan.<sup>2</sup> Dalam inti kegiatannya, administrasi dalam suatu organisasi adalah proses pembuatan keputusan. Ini mencakup seluruh alur pengambilan keputusan, dimulai dari mengenali masalah hingga mengevaluasi hasil keputusan, dengan melibatkan setiap bagian administrasi sebagai sebuah sistem organisasi. Dengan kata lain, untuk membuat keputusan yang akurat dan

---

<sup>1</sup> Sinebe, M. T, "Conceptual Review Of Herbert Simon's Decision-Making Theories and Its Applicability in Contemporary Organisations," *Delsu Journal of Management Sciences* 01, no. 01 (2024): 3.

<sup>2</sup> Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan* (Bandung: ALFABETA, cv, 2023), 1.

cepat dalam mengatasi masalah yang muncul akibat perubahan dalam organisasi, diperlukan informasi yang memadai dari sumber internal maupun eksternal.<sup>3</sup>

Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih realistis terhadap perilaku manusia dalam organisasi, di mana keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tersedia dan dalam batasan waktu serta sumber daya yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Devi yang dikutip Sinebe yang menjelaskan bahwa model pemecahan masalah melalui pengambilan keputusan, mereka mencatat bahwa sangat penting bagi organisasi dan administrasi untuk menguraikan strategi yang dapat digunakan untuk mengungkap dan mengembangkan pilihan guna meningkatkan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan.<sup>4</sup>

Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah melibatkan penilaian situasi, mengevaluasi opsi, menciptakan pilihan, dan memilih tindakan terbaik. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, kemampuan dalam mengambil keputusan menjadi sangat penting, khususnya ketika kepala sekolah menetapkan arah kebijakan kurikulum yang nantinya akan berpengaruh langsung terhadap implementasinya. Menurut Usman yang dikutip oleh Sahnun dan Wibowo, arah kebijakan kurikulum memiliki keterkaitan yang kuat dengan cara penerapannya. Implementasi kurikulum sendiri dimaknai sebagai rangkaian program yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan secara serius sesuai dengan norma-norma yang berlaku guna mencapai tujuan tertentu<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Harbani Pasolong, 22.

<sup>4</sup> Sinebe, M. T, "Conceptual Review Of Herbert Simon's Decision-Making Theories and Its Applicability in Contemporary Organisations," 5.

<sup>5</sup> Ahmad Sahnun and Tri Wibowo, "Arah Baru Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Dasar," *SITTAH: Journal of Primary Education* 4, no. 1 (2023): 32.

Menurut W. Apple kurikulum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong siswa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah.<sup>6</sup> Menurut Julaeha yang dikutip Sahnun dan Wibowo menjelaskan bahwa kepala sekolah perlu memahami bahwa kebijakan kurikulum yang ditetapkan harus mendorong transformasi pola pikir peserta didik.<sup>7</sup> Dengan memperhatikan pentingnya kebijakan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Dengan demikian, kebijakan kurikulum yang mendorong berpikir kritis dan transformasi pola pikir peserta didik perlu didasari oleh landasan nilai dan prinsip yang kuat, termasuk dalam hal pengambilan keputusan.

Berikut merupakan dalil mengenai bermusyawarah dalam mengambil keputusan menurut Q.S. Ali Imran/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Berdasarkan Tafsir Al-Mukhtashar, ayat ini menyatakan bahwa disebabkan oleh rahmat yang besar dari Allah-lah akhlak kamu wahai Nabi menjadi lunak kepada sahabat-sahabatmu. Seandainya engkau menunjukkan sikap kasar dalam ucapan dan tindakanmu, serta mempunyai hati yang keras, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. Oleh karena itu maafkanlah kekurangan mereka dalam

---

<sup>6</sup> W. Apple, *Ideology and Curriculum* (London: Routledge, 2019), 70.

<sup>7</sup> Ahmad Sahnun and Tri Wibowo, "Arah Baru Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Dasar," 34.

bersikap kepadamu. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka untuk membahas masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian apabila kamu sudah bertekad melakukan sebuah keputusan setelah bermusyawarah, maka kerjakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya, dan Dia memberikan bimbingan serta dukungan-Nya kepada mereka.<sup>8</sup>

Kandungan asbabun nuzul Surat Ali-Imran ayat 159 merupakan kunci dalam membentuk pribadi muslim yang negarawan. Sebab, kandungan asbabun nuzul Surat Ali-Imran 159 mengajarkan nilai-nilai demokratis. Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang Badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Balar. Sahabat Abu bakar memberikan usulan kepada Rasulullah SAW agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat bahwa agar para tawanan perang di eksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka.

Menanggapi usulan dua dari sahabat, maka Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali-Imran ayat 159 yang mengafirmasi pendapat sahabat Abu Bakar as Shidiq, Rasulullah mengajarkan. kepada kita agar selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Terlebih lagi, permasalahan yang dihadapi mengenai dengan

---

<sup>8</sup> Ibnu Katsir Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Tafsir Al-Mukhtashar*, Q.S. Ali Imran/3:159.

hajian orang banyak. Sebab, manusia hidup mempunyai keinginan masing-masing, sehingga perlu adanya titik temu lewat musyawarah.

Pengambilan keputusan oleh kepala sekolah di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Berikut adalah undang-undang dan peraturan yang relevan: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan sekolah dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan atau oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

Karena sebuah keputusan melibatkan risiko, pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Sebenarnya, setiap keputusan membawa risiko yang harus dihadapi, terutama oleh orang yang membuat keputusan, yaitu kepala sekolah.<sup>9</sup> Begitu juga dengan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan, keterampilan kepemimpinan, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Dengan melibatkan semua pihak dan memastikan implementasi yang tepat, sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kurikulum merdeka merupakan konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang dan mengelola kurikulum serta lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>10</sup> Dian Marta Wijayanti, Suwito Eko Pramono, and Eko Handoyo, "Principal Decision-Making in Implementing Merdeka Curriculum in Elementary Schools: A Review," *International*

Perubahan kebijakan pendidikan seperti diberlakukannya kurikulum merdeka ini menuntut kepala sekolah untuk mampu mengambil keputusan yang adaptif, cepat, dan berbasis prinsip. Kurikulum merdeka memberi keleluasaan kepada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, sehingga kepala sekolah dituntut untuk memahami filosofi kurikulum sekaligus memimpin proses implementasinya di sekolah. Dalam praktiknya itu, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala bidang kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin, diketahui bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka sempat menghadapi hambatan pada masa awal penerapan, terutama karena keterbatasan informasi teknis dari pemerintah. Sekolah harus melakukan pelatihan mandiri agar implementasi kurikulum berjalan.<sup>11</sup> Situasi ini mendorong pihak sekolah untuk berinisiatif mengadakan pelatihan dan workshop internal secara mandiri, serta menggali informasi kurikulum dari berbagai sumber eksternal. Di sinilah peran kepala sekolah menjadi sangat penting dalam mengambil keputusan yang strategis dan terukur demi menjamin kelangsungan proses pembelajaran yang sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Peneliti menemukan beberapa studi sebelumnya, seperti oleh Zulli Nurrita,<sup>12</sup> Nur Fadilah,<sup>13</sup> dan Irvan Febrian Hidayat.<sup>14</sup> Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut lebih menyoroti strategi pengambilan keputusan atau peningkatan mutu pendidikan secara umum. Namun, kajian yang secara khusus meneliti penerapan prinsip-prinsip pengambilan keputusan kepala sekolah dalam merespons perubahan kebijakan kurikulum, khususnya Kurikulum Merdeka, masih jarang dilakukan, terlebih di lingkungan sekolah Islam terpadu.

SDIT Ukhuwah Banjarmasin merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terpadu yang berada di bawah naungan Yayasan Ukhuwah. Sekolah ini memiliki dua unit, yaitu SDIT Ukhuwah 1 dan SDIT Ukhuwah 2, yang keduanya telah melaksanakan Kurikulum Merdeka. Meskipun keduanya berada di bawah manajemen yang sama, SDIT Ukhuwah 1 memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain berdiri lebih dulu, memiliki jumlah peserta didik dan tenaga pendidik lebih banyak. Selain itu, SDIT Ukhuwah 1 juga termasuk dalam kategori Sekolah Penggerak, yakni sekolah yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai model pelaksana transformasi pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka. Status ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjadi contoh penerapan kebijakan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan skala, kompleksitas, dan posisinya yang strategis, SDIT

---

<sup>12</sup> Zulli Nurrita, "Skripsi: Strategi Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Efektif di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tuban (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2021)," n.d.

<sup>13</sup> Nur Fadilah, "Skripsi: Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Smp It Nurul Ilmi Medan Estate (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2019)," n.d.

<sup>14</sup> Irvan Febrian Hidayat, "Skripsi: Pelaksanaan Pengambilan Keputusan oleh Kepala Madrasah di Mts Al-Hidayah Bandar Lampung (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021)," n.d.

Ukhuwah 1 memberikan konteks yang representatif dan relevan untuk mengkaji bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan dalam proses perubahan kurikulum

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang secara khusus menggali penerapan prinsip-prinsip pengambilan keputusan oleh kepala sekolah itu sendiri. Dimulai dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dalam Menentukan Kebijakan Kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin.”

## **B. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan untuk mempermudah pembaca dalam menelusuri pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi operasional sebagai penegasan batasan ruang lingkup masalah. Adapun definisi operasional dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Prinsip Pengambilan Keputusan**

Istilah "prinsip" dalam konteks manajemen dan etika memiliki definisi yang terkait dengan pedoman moral dan nilai-nilai yang membentuk dasar bagi perilaku dan keputusan manusia. Dalam konteks manajemen, Prinsip manajemen adalah aturan fundamental yang wajib diikuti manajer saat menjalankan tugasnya. Prinsip-

prinsip ini membantu manajer mengatasi masalah dan tantangan yang muncul selama proses pengelolaan. Singkatnya, prinsip manajemen menjadi fondasi keberhasilan atau kegagalan sebuah manajemen. Menurut Henry Fayol, prinsip manajemen haruslah fleksibel. Artinya, prinsip-prinsip ini perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik dan situasi yang berpotensi berubah.<sup>15</sup>

Selanjutnya, menurut George R. Terry menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih satu tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia, dan sedangkan menurut Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.<sup>16</sup> Menurut McShane yang dikutip oleh Hardianto, dkk., menerangkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses sadar dalam membuat pilihan di antara alternatif-alternatif untuk bergerak menuju suatu keadaan yang diinginkan.<sup>17</sup> Pada lingkup suatu organisasi seperti jasa pendidikan, pengelolaan organisasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Simon bahwa pengelolaan organisasi dan pengambilan keputusan memiliki makna yang sama secara virtual. Pengelolaan organisasi melibatkan berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, pengaturan sumber daya, dan pengembangan strategi dalam meraih tujuan yang ditetapkan. Pengambilan keputusan, di sisi lain, adalah proses

---

<sup>15</sup> Agoes Parera, *Dasar Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 10.

<sup>16</sup> Ahmad Syaekhu and Suprianto, *Teori Pengambilan Keputusan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 2.

<sup>17</sup> Hardianto, Zulkifli, and Hidayat, "Analysis of Principals' Decision-Making: A Literature Study," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 13, no. 3 (2021): 2022, <https://doi.org/10.35445>.

penting dalam pengelolaan organisasi di mana kepala sekolah harus memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif yang ada.<sup>18</sup>

Jadi dari definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa prinsip pengambilan keputusan adalah pedoman dasar yang digunakan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, dan situasi yang dihadapi. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara sistematis dan rasional agar menghasilkan tindakan yang paling tepat dan efektif. Dalam konteks organisasi, terutama di bidang pendidikan, pengambilan keputusan berperan penting dalam mengelola sumber daya, menyusun strategi, dan mencapai tujuan organisasi. Fleksibilitas dalam prinsip manajemen juga diperlukan agar keputusan yang diambil dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah.

## **2. Kepala Sekolah**

Menurut Suparman, posisi kepala sekolah merupakan peran kepemimpinan yang tidak dapat diisi secara sembarangan. Penunjukan seseorang sebagai kepala sekolah harus melalui prosedur tertentu dan memenuhi sejumlah kriteria, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, jenjang pangkat, serta integritas. Kepala sekolah adalah pemimpin utama di sebuah institusi pendidikan, tempat proses belajar mengajar berlangsung. Ia adalah seorang guru dengan kemampuan kepemimpinan yang bertugas mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya

---

<sup>18</sup> Khadijah Adilah et al., *Pengambilan Keputusan dalam Pengembangan Kurikulum* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2024), 4.

sekolah secara optimal demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kepala sekolah adalah komponen kunci yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>19</sup> Sagala mengatakan bahwa kepala sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola sekolah, dengan tugas menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal demi tercapainya tujuan pendidikan.<sup>20</sup>

Jadi, dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seorang pemimpin lembaga pendidikan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya sekolah secara maksimal demi mencapai tujuan bersama, dan merupakan komponen kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan.

### **3. Kebijakan Kurikulum**

Menurut Monahan dalam Syafaruddin yang dikutip Rozak, secara etimologi, kata "kebijakan" (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, "*Polis*," yang berarti "kota." Kebijakan sendiri adalah aturan formal tertulis dari sebuah organisasi yang bersifat mengikat. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku dan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut Dunn yang dikutip Rozak berpendapat bahwa kebijakan berfungsi sebagai panduan utama bagi anggota organisasi atau masyarakat dalam bertindak. Umumnya, kebijakan bersifat solutif dan proaktif, dirancang untuk mengatasi masalah dan mengantisipasi

---

<sup>19</sup> Suparman, *Kepimimpinan Kepala Sekolah & Guru (Sebuah Pengantar Teoritik)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 14.

<sup>20</sup>Sagala and H. Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 19.

perkembangan. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan lebih adaptif dan fleksibel dalam penafsirannya, meskipun tetap menetapkan batasan "boleh" dan "tidak boleh." Kebijakan diharapkan bersifat umum namun tetap mempertimbangkan kekhasan lokal, serta memberikan ruang untuk interpretasi yang sesuai dengan kondisi spesifik di lapangan.<sup>21</sup>

Secara etimologi, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani: "*curir*" yang berarti pelari, dan "*curere*" yang berarti tempat berpacu. Istilah ini awalnya digunakan dalam dunia atletik di Romawi Kuno, merujuk pada jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari awal hingga akhir untuk meraih medali. Dalam konteks modern, kurikulum diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan dan pengalaman pembelajaran (isi/materi) yang telah dirancang secara sistematis. Ini mencakup apa pun yang terjadi baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah, semuanya bertujuan untuk mencapai sasaran pendidikan tertentu.<sup>22</sup>

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum mengacu pada keputusan yang disengaja dan sistematis yang dibuat oleh lembaga pendidikan, pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk konten, struktur, dan penyampaian program pendidikan. Kebijakan kurikulum mencakup prinsip, pedoman, dan peraturan yang mengatur pengembangan, penerapan, dan evaluasi kurikulum, yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan hasil pendidikan tertentu. Kebijakan kurikulum yang efektif memastikan bahwa program pendidikan selaras dengan misi lembaga, kebutuhan

---

<sup>21</sup> Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *Journal of Islamic Educatioan* 3, no. 2 (2021): 200.

<sup>22</sup> Nurhayati et al., *Pengembangan Kurikulum* (NTB: Hamjah Diha Foundation, 2022), 1–2.

siswa, dan tuntutan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, keputusan mengenai kurikulum biasanya dibuat secara rasional dan terstruktur. Penting untuk melibatkan kepala sekolah dan guru-guru berpengalaman dalam proses pengambilan keputusan kurikulum yang diinginkan.<sup>23</sup>

### **C. Fokus Penelitian**

1. Apa prinsip pengambilan keputusan yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian maka dapat diketahui tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui Prinsip pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin, sedangkan tujuan yang secara rinci dapat dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Syafaruddin Anzizhan, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, n.d.), 114.

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan kurikulum di SDIT Ukhuwah Banjarmasin.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, khususnya dalam menentukan kebijakan kurikulum sekolah melalui prinsip pengambilan keputusan kepala sekolah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input yang baik untuk kepala sekolah agar bisa melaksanakan tugasnya dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan tepat untuk menentukan kebijakan kurikulum di sekolah.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman sehingga mendapatkan gambaran yang nyata mengenai upaya menentukan kebijakan kurikulum di sekolah.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berkesinambungan digunakan sebagai perbandingan dan bahan acuan, dan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dipaparkan, seperti berikut:

1. Zulli Nurrita, dalam skripsinya yang berjudul Strategi Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Efektif di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tuban, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
  - a. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi pengambilan keputusan kepala sekolah di SMA Negeri 3 Tuban, b. Menganalisis dan mendeskripsikan mewujudkan Sekolah Efektif di SMA Negeri 3 Tuban, c. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi pengambilan keputusan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah efektif di SMA Negeri 3 Tuban.<sup>24</sup>
2. Nur Fadilah, dalam skripsinya yang berjudul Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Smp It Nurul Ilmi Medan Estate, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; a. proses kebijakan kepala sekolah di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate, b. Mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate, c. Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate, d. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti

---

<sup>24</sup>Zulli Nurrita, "Skripsi: Strategi Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Efektif di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tuban (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2021)," n.d.

adalah mengenai permasalahannya dan pada penelitian ini membahas mengenai proses kebijakan kepala sekolah di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate, mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate dan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate.<sup>25</sup>

3. Irvan Febrian Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Madrasah di Mts Al-Hidayah Bandar Lampung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Tahapan-tahapan yang diambil oleh Kepala Madrasah dalam pelaksanaan pengambilan sebuah keputusan di MTs Al-Hidayah Bandar Lampung, b. Kualitas keputusan Kepala Madrasah dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, c. Solusi yang digunakan Kepala Madrasah dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pelaksanaan pengambilan keputusan.<sup>26</sup>
4. Vinda Devi Yana, dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Sekolah di SMP-IT Qurrata A'yun Batusangkar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam pengambilan Keputusan SMP-IT Qurrata A'yun Batusangkar, b. Kendala-kendala yang ditemukan oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di SMP-IT

---

<sup>25</sup>Nur Fadilah, "Skripsi: Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Smp It Nurul Ilmi Medan Estate (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2019)," n.d.

<sup>26</sup>Irvan Febrian Hidayat, "Skripsi: Pelaksanaan Pengambilan Keputusan oleh Kepala Madrasah di Mts Al-Hidayah Bandar Lampung(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021)," n.d.

Qurrata' Ayun Batusangkar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengenai permasalahannya dan pada penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan SMP-IT Qurrata A'yun Batusangkar, dan kendala-kendala yang ditemukan oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di SMP-IT Qurrata' Ayun Batusangkar.<sup>27</sup>

5. Rahmi Hanifah, dalam skripsinya yang berjudul Strategi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di SD Al Kautsar Bandar Lampung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Strategi kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Al Kautsar, b. Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Al Kautsar, c. Solusi kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Al Kautsar.<sup>28</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian secara keseluruhan sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari lima bab yang menjadi satu kesatuan. Adapun penyusunan dapat diruntut kan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Vinda Devi Yana, "Skripsi: Pelaksanaan Pengambilan Keputusan oleh Kepala Sekolah di SMP-IT Qurrata A'yun Batusangkar (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, 2021)," n.d.

<sup>28</sup>Rahmi Hanifah, "Strategi Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al Kautsar Bandar Lampung," 2019.

- Bab I           Pendahuluan, terdiri dari: Konteks penelitian, definisi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu.
- Bab II           Kajian teori dan Kerangka, terdiri dari: Pengertian kepala madrasah, pengertian prestasi akademik, faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan prestasi akademik siswa, peran kepala madrasah dalam mengatasi kesenjangan prestasi akademik, dan strategi kepala madrasah.
- Bab III          Metode Penelitian, yang terdiri: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen data, teknis analisis data, dan teknis validitas dan keabsahan data. Sistematika penulisan.
- Bab IV          Hasil Penelitian dan Pembahasan.
- Bab V          Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan saran.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hamdan et al., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Makalah, Artikel, Jurnal Proposal Skripsi, Skripsi* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).